**ABSTRAK**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Masalah yang ditemukan yaitu kebijakan Kurikulum 2013 mengalami beberapa perubahan peraturan akibat revisi-revisi yang terjadi dan terlalu terburu-buru dalam menerapkannya. Sehingga membuat para pelaksana kebijakan menjadi kebingungan untuk memahami konsep dan mekanisme Kurikulum 2013. Lalu diperparah oleh tidak tersediaannya pengadaan buku guru dan buku murid bagi kelas 2, 3, 5 dan 6, serta ditambah oleh pemberian fasilitas pelatihan dari pemerintah pusat dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung belum maksimal bagi para pelaksana seperti kepala sekolah dan guru-guru Sekolah Dasar di Kota Bandung. Maka dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung sejauh ini belum efektif.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deksriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis teknik penelitian fenomenologi dan disertai penelitian lapangan diantaranya yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan penelitian didalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan sebagai informasi kunci, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, 1 orang staf Seksi Kurikulum Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung, lalu 3 orang Kepala Sekolah SD di Kota Bandung, dan 6 orang wakasek kurikulum SD di Kota Bandung sebagai pelaksana di sekolah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung dapat dilihat dari dimensi Komunikasi, Sumber-Sumber, Kecenderungan-Kecenderungan atau Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari keempat dimensi tersebut menyimpulkan bahwa kejelasan pengkomunikasian kebijakan Kurikulum 2013 yang dikeluarkan pemerintah pusat sering berubah-rubah cenderung tidak konsisiten dari segi desain dan konsepnya, terkait sumber daya bahwa adanya kendala dari pemahaman guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 tingkat Sekolah Dasar di Kota Bandung ditambah oleh tidak tersedianya sarana belajar guru dan siswa yang memadai, lalu para pelaksana kebijakan baik aparatur Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar di Kota Bandung memunculkan upaya kearah yang lebih positif agar selalu siap menghadapi Kurikulum 2013, serta terkait struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung bersama LPMP Jawa Barat dan stakeholder lainnya berkordinasi untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dalam menunjang keberhasilan Kurikulum 2013 dan para pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Bandung melaksanakan kebijakan Kurikulum 2013 berpedoman kepada SOP agar kebijakan tersebut tetap pada jalurnya.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah**.

**ABSTRACT**

This research aims to find out how the implementation of Curriculum policy in 2013 the rate of primary school in the city of Bandung On duty education of Bandung city. Problem found i.e. Curriculum policy 2013 having some rule change due to revisions going on and too hasty in implementing them. So make the implementing policy into confusion to understanding the concept of the Curriculum and the mechanism of 2013. Then compounded by not tersediaannya the procurement of books teachers and pupils book for class 2, 3, 5 and 6, as well as supplemented by awarding training facilities from the Central Government and the construction given by the education service of Bandung has not been fullest for the implementers of such principals and teachers of primary schools in the city of Bandung. Then from the problems that occur can be said that the implementation of the curriculum 2013 primary level in Bandung city so far has not been effective.

The research method used i.e. research deksriptif analysis using qualitative approach. Data collection techniques are used i.e. analysis technique research of Phenomenology and accompanied the research field of them namely observation, interview and documentation. While the informant research in this study was the head of the primary school Curriculum Section Office of education as a key information, the head of primary school education service, 1 Section staff Curriculum Elementary Education Office of Bandung, and then 3 people Head elementary school in the city of Bandung, and 6 people wakasek curriculum elementary school in the city of Bandung as the executor in the school. Data analysis techniques used for data reduction, namely the presentation of data, as well as the withdrawal of the conclusion.

From the results of research show that the implementation of Curriculum Policy 2013 level elementary school in Bandung city can be seen from the communication dimension, sources, tendencies or Dispositions, and bureaucratic structure. Of the four dimensions that concludes the clarity of Curriculum policy pengkomunikasian 2013 issued by Central Government often change foxes tend not to konsisiten in terms of concept, design and related resources that the existence of barriers of understanding teachers in implementing the Curriculum at primary school level to 2013 Bandung plus by the unavailability of teachers and students learning tools are adequate, then the implementers of good policy apparatus of Bandung City Education Office or the principal and teachers of the primary school in the city of Bandung gave rise to efforts towards a more positive so that is always ready to face the 2013, as well as Curriculum related organizational structure Office of education shared the city of Bandung in West Java LPMP and other stakeholders to improve the quality of berkordinasi educators in support of success implementing the 2013 and the Curriculum in the education service of Bandung city implement policies 2013 based Curriculum to the SOP so that those policies stay on track.

**Keywords: Government, Policy Implementation.**